

**PENGARUH PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
TERKAIT DENGAN IKLIM INVESTASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL
DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Julia Agnetha Agnesta Br. Barus^{)}*

*Budiman Ginting^{**)}*

*Mahmul Siregar^{***)}*

ABSTRACT

The activity of capital investment as an effort to increase economic growth should be supported by transparent coordination and policy of capital investment in order to create conducive climate. CSR in a corporation is a legal responsibility which should be implemented by the corporation. According to Law No. 25/2007 on Capital Investment a conducive investment climate can be realized when there are legal certainty and certainty for doing business, facility in giving license to investors, good political condition in the State, and low economic cost for the benefit of the investors. The implementation of CSR in a corporation can be known when the corporation has carried out the principles of responsibility, sustainability, accountability, and transparency and the principles found in ISO 26000. The influence of the principle of Corporate Social Responsibility on the investment climate under Law No. 25/2007 on Capital Investment and Law No. 40/2007 on Corporation is that the implementation of CSR by a corporation can make reciprocal relationship which will be mutually beneficial for its stakeholders. CSR will give positive implication for increasing people's welfare, creating conducive investment climate, reducing cost, helping develop the government, strengthening business investment, and strengthening the partnership among the people, the government, and the business world. If this condition can be realized, investors will be interested in investing their capital in the corporation which carries out CSR in Indonesia.

Kata kunci : Prinsip, Corporate Social Responsibility (CSR), Investasi.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah rangkaian perubahan yang dilakukan secara menyeluruh terarah dan terencana dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan bathiniah. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya

kebutuhan pokok sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (rumah) yang layak.¹

Oleh karena itu, pembangunan nasional mesti mengacu pada konsep pembangunan yang utuh menyeluruh dan melibatkan peran aktif masyarakat. Tanpa peran aktif masyarakat, maka pembangunan nasional akan mengalami hambatan dan bahkan kegagalan.

^{*)} Penulis.

^{**)} Dosen Pembimbing I.

^{***)} Dosen Pembimbing II.

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) hal.1.

Apabila dikaji perjalanan pembangunan di Negara Indonesia, titik berat pembangunan adalah di bidang ekonomi, dengan maksud apabila pembangunan ekonomi berhasil, maka akan berakibat kepada bidang-bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu maka untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi yang baik maka diperlukan adanya aturan hukum yang jelas, dan untuk mewujudkan hal tersebut maka sudah sepantasnya para ahli hukum diajak secara aktif integratif untuk merumuskan berbagai kebijakan di segala bidang pembangunan.²

Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kuantitas devisa negara ataupun pendapatan asli daerah, maka diperlukan investasi berskala besar, baik yang berasal dari luar negeri (asing) ataupun dari dalam negeri (lokal). Oleh karena itu, dalam mengundang investasi langsung (*direct investment*) di suatu wilayah diperlukan usaha untuk mempercantik diri, yaitu usaha untuk memberikan kepercayaan kepada para calon investor (penanam modal) agar mau berinvestasi di wilayah tersebut. Usaha tersebut yaitu meliputi penciptaan iklim investasi yang dianggap kondusif bagi para calon investor hingga mereka merasa aman dan nyaman apabila menanamkan modalnya. Hal itu bisa dilakukan dengan mempermudah izin, memberi kepastian hukum, hingga insentif. Dan tentunya usaha tersebut juga bisa dilakukan seiring dengan gencarnya melakukan promosi yang intensif pada berbagai media yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada para calon investor tersebut. Tetapi tentu saja semua pemanis ini diberikan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada dan tidak merugikan kepentingan bangsa³.

Aktivitas penanaman modal sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus senantiasa didukung oleh adanya koordinasi yang jelas dari kebijakan penanaman modal itu sendiri untuk menciptakan iklim yang

kondusif dalam rangka peningkatan jumlah investasi, baik koordinasi antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah karena tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan⁴. Penciptaan iklim investasi yang kondusif yang menyangkut insentif, kemudahan usaha, ketertiban dan kepastian hukum berusaha biasanya dituangkan dalam suatu peraturan yang biasanya tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk menilai apakah penciptaan iklim investasi yang kondusif tersebut sudah berjalan dengan efektif, maka digunakanlah indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam penilaian hasil kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi. Indikator kinerja dari penciptaan iklim investasi yang kondusif tersebut yaitu bertambahnya nilai investasi PMA/PMDN serta adanya prosedur investasi yang lebih efisien dan efektif.

Secara yuridis pengaturan soal CSR secara eksplisit dalam hukum Indonesia dimulai ketika pemerintah memberlakukan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dalam Pasal 15 menyebut bahwa setiap Penanam Modal (perseorangan atau perusahaan, berbadan hukum ataupun bukan badan hukum) berkewajiban untuk:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kemudian perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang No.40

² Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal.53.

³Sastro Soenarto, koordinator *Indonesian Investment Watch* (Indvest). <http://www.indvest.watch.com./indonesia.htm>, (diakses tanggal 26 Desember 2012).

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hal. 1.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah membawa perubahan penting bagi dunia usaha di Indonesia. Salah satu yang mendapat perhatian lebih dari kalangan pengusaha adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR), karena CSR akhir-akhir ini telah menjadi salah satu faktor penilaian bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. CSR menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 74 UUPT No.40 Tahun 2007, yang menyatakan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari kedua undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa tampaknya konsep CSR di Indonesia dinamakan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP).

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Di Indonesia

perkembangan CSR masih sangat dini, namun cukup pesat. Sebenarnya konsep CSR sudah tampak dalam budaya yang ada pada masyarakat, seperti budaya gotong royong yang merupakan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia patut dipertahankan. Makna semangat gotong royong yang menjiwai setiap warga masyarakat terlebih pada masyarakat industri/modern patut dicermati.

PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normative yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan iklim investasi dan prinsip *Corporate Social Responsibility*. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana keberadaan CSR dalam perusahaan perseroan terbatas, kemudian dibahas lagi mengenai bagaimana iklim investasi yang kondusif menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, selanjutnya dibahas bagaimana pengaruh prinsip *Corporate Social Responsibility* terkait dengan iklim investasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Wujud *social responsibility* dalam suatu perusahaan terimplementasi melalui program CSR. Praktek CSR dipercaya menjadi landasan fundamental bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi *stakeholders* dalam arti keseluruhan. Hal tersebut terlihat dari berbagai rumusan CSR yaitu sebagai berikut :⁵

⁵ Departemen Hukum & HAM, 2010, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal", Available from:

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyebutkan CSR sebagai "continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society large". (komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya) John Elkington's memberikan penegasan bahwa, "Corporate Social Responsibility is a concept that organisation especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the interests of customers, employees, shareholders, communities, and ecological considerations in all aspect of their operations. This obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation".⁶

CSR terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). CSR memerlukan keterlibatan langsung perusahaan yang memungkinkan semua *stakeholders*nya aktif berpartisipasi juga guna mewujudkan kebersamaan, khususnya bagi kelangsungan dari perusahaan dan *stakeholders*nya. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal

ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Jadi pada dasarnya munculnya CSR tidak terlepas dari pendapat filsuf Aristoteles yang mengemukakan bahwa setiap individu merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Tentunya konsep ini membutuhkan suatu prinsip keadilan yang menurut Rawls dan Nozick menyebutnya sebagai berikut:⁷

"Justice is about a concept of 'right relations' in society and the choice is not between individualism and cooperation, but rather a choice to be made for the expression of the individualism of human beings as social creatures"

Salah satu cara untuk menciptakan hubungan yang baik sebagaimana dikemukakan dalam prinsip diatas, yang sepatutnya dilakukan oleh perusahaan sebagai komponen masyarakat sosial adalah melalui program CSR. Dari berbagai pengertian dan konsep CSR yang dikemukakan diatas, pada dasarnya CSR mengenal dua model pelaksanaan, yakni CSR yang dilakukan berdasarkan prinsip *voluntary* (secara suka rela), dan prinsip *mandatory* (secara wajib). Mengingat Indonesia telah merumuskan CSR ini kedalam suatu regulasi yakni dalam Pasal 74 UUPT, maka dapat dikatakan bahwa prinsip pelaksanaan CSR yang dilaksanakan terutama bagi perusahaan PT di Indonesia adalah bersifat *mandatory*.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan CSR adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 (b) dan Pasal 34
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian menimbang butir a, b, d, e, Pasal 1 butir 1, 2, 3, dan Pasal 3.
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 (PP No. 47/2012) tentang Tanggung Jawab

<http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/jurnal-legislasi>.

⁶ John Elkington, January 2000, *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Journal of Business Ethics, Volume 23, Number 2, available from: <http://www.springerlink.com/business-and-economics>.

⁷ Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, (London) Blackstone Press Limited, 1996. hal. 275.

Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 74 ayat (4), PP No. 47/2012 merupakan amanat langsung dari Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Business for Social Responsibility*,⁸ adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain:⁹

1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*increased sales and market share*).
2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*strengthened brand positioning*).
3. Meningkatkan citra perusahaan (*enhanced corporate image*).
4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pegawai (*increased ability to attract, motivate, and retain employees*).
5. Menurunkan biaya operasi (*decreasing operating cost*).
6. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (*increased appeal to investors and financial analysts*).

B. IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Bank Dunia mendefinisikan bahwa iklim investasi adalah suatu kumpulan faktor-faktor tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi badan usaha untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan dan perkembangan kegiatan usaha. Suatu iklim investasi yang baik akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan-kesempatan dan insentif bagi badan-badan usaha untuk berkembang, menyesuaikan

diri dan menerapkan cara-cara yang lebih baik dalam menjalankan investasi.¹⁰

Adapun faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perkembangan iklim investasi dapat diatasi dengan baik, adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas Politik (*Political Stability*)

Salah satu pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi adalah melihat kondisi politik yang terjadi pada suatu negara yang menjadi tujuan investasinya. Para investor akan datang berinvestasi kepada suatu negara yang memiliki stabilitas politik. Sebaliknya, jika pada suatu negara sering terjadi konflik elite politik ataupun konflik masyarakat, maka para investor tidak akan berinvestasi pada negara tersebut. Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik, para investor akan sulit memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha.¹¹

2. Keuntungan ekonomi (*Economic Opportunity*)
Untuk menarik investor berinvestasi, dibutuhkan adanya keuntungan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan pasar yang prospektif. Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki alamiah dan komparatif. Ini dapat dilihat dari negeri yang sangat luas dengan kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk sangat besar sehingga dapat membentuk suatu pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.¹²

3. Kepastian hukum (*Legal Certainty*)

Para investor akan datang ke suatu negara, bila dirasakan negara tersebut dalam situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai

⁸ *Business for Social Responsibility* adalah suatu organisasi non profit global, yang usahanya adalah memberikan informasi, instrumen, pelatihan-pelatihan, dan jasa konsultan yang menyangkut *Corporate Social Responsibility* (CSR).

⁹ Bismar Nasution "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial", <http://bismar.wordpress.com/>, terakhir kali diakses tanggal 30 November 2012.

¹⁰ Bank Dunia, *Laporan Pembangunan Dunia; Iklim Investasi yang Lebih Baik Bagi Setiap Orang*. (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hal 23.

¹¹ Sentosa Sembiring. *Hukum Investasi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), hal. 27.

¹² Budi Untung. *Hukum Investasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 48.

dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan Perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah penegakan supermasi hukum (*rule of law*).¹³

Indonesia sebagai suatu negara hukum, hendaknya pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan Negara Indonesia mampu menegakkan hukum dengan membuat suatu produk hukum yang mengatur secara tegas mengenai kegiatan investasi (dalam hal ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Dengan adanya penegakan hukum tersebut, diharapkan para investor dapat tertarik untuk berinvestasi karena para investor dapat merasakan suatu jaminan keamanan terhadap kegiatan usahanya di Indonesia.

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitannya tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Hal tersebut terkait pula dengan masalah pemanfaatan tata ruang, gangguan lingkungan dan ketertiban umum. Selain itu iklim investasi merupakan suatu proses jangka panjang yang senantiasa berjalan searah dengan perkembangan usaha. Iklim investasi bukan hanya dipertimbangkan pada awal rencana investasi, akan tetapi merupakan variabel strategis yang akan menentukan keberhasilan investasi sepanjang perusahaan berjalan. Iklim investasi yang kondusif akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan-kesempatan dan insentif bagi badan-badan usaha untuk berkembang, menyesuaikan diri dan menerapkan cara-cara yang lebih baik dalam menjalankan investasi.

Iklim investasi yang kondusif akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang mendatangkan keuntungan dalam sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya mekanisme yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Peningkatan iklim investasi merupakan daya penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Suatu konsep yang dapat menyatakan bahwa di suatu Negara dapat dikatakan telah tercipta suatu iklim investasi yang baik adalah apabila terwujud :

1. suatu kepastian hukum dalam dunia usaha,
2. adanya kestabilan kondisi politik di Negara tujuan investasi,
3. ekonomi yang tidak berbiaya tinggi,
4. mudahnya pemberian izin kepada investor untuk berusaha dengan masih tetap dalam ruang lingkup pengawasan pihak yang berwenang.

Hal ini dapat terwujud apabila asas-asas yang ada di dalam UUPM dilaksanakan, seperti :

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:¹⁴

1. Kepastian hukum,
2. Keterbukaan,
3. Akuntabilitas,
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara,
5. Kebersamaan,
6. Efisiensi berkeadilan,
7. Berkelanjutan.
8. Berwawasan lingkungan,
9. Kemandirian,
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Iklim investasi yang baik adalah iklim investasi yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam mewujudkan suatu iklim investasi di suatu Negara tidak lepas dari peran penanam modal yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian. Adanya kepentingan dari setiap pihak yang saling menguntungkan membuat Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk menjadi negara tujuan daripada si penanam modal.

¹³ Ibid. hlm. 55.

¹⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

C. PENGARUH PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERKAIT DENGAN IKLIM INVESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Suatu negara pastilah menginginkan agar roda pemerintahannya dapat berjalan dengan baik. Roda pemerintahan yang dijalankan dengan baik tersebut bertujuan agar setiap rakyat yang berada di dalam negara tersebut mendapatkan kesejahteraan hidup. Rakyat yang hidup sejahtera adalah rakyat yang merasakan bahwa kehidupan perekonomiannya dapat terselenggara dengan baik.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diharapkan dapat memberikan jaminan bagi setiap kegiatan investasi yang terlaksana di Indonesia. UUPM ini mencakup seluruh aspek kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penanaman modal. Hak, kewajiban dan tanggung jawab daripada si investor, diatur secara khusus oleh UUPM ini guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban si investor guna menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dalam melaksanakan tanggung jawab social perusahaan.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan CSR dapat dilihat pada:¹⁵

Setiap penanam modal berkewajiban:

1. Pasal 15
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. .
2. Pasal 34
 - a. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁶

Setiap penanam modal diwajibkan untuk memperhatikan lingkungan sekitar dalam menjalankan perusahaannya. Dengan diberlakukannya CSR tersebut, diharapkan setiap penanam modal dapat memperhatikan alam sekitarnya dan dapat menjalin suatu hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar perusahaan. Dengan terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang itu, maka para stakeholder perusahaan itu merasakan manfaat yang saling menguntungkan baik itu secara ekonomis maupun social.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁶ Penjelasan atas Pasal 15 butir (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Adanya hubungan yang dijalin dengan baik oleh para investor, maka akan meningkatkan rasa kepercayaan yang tinggi dari masyarakat bagi perusahaan yang dimiliki oleh investor tersebut. Sehingga keuntungan ekonomis dapat dirasakan oleh investor dan masyarakat sekitar.

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* antara lain adalah sebagai berikut :

1. Prinsip *Responsibility*

Pada Prinsip *Responsibility* ini, perusahaan ditekankan kepada kepentingan *stakeholder* perusahaan. Bagaimana tingkat pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kepentingan para *stakeholder*-nya. Para *stakeholder* yang dimaksud disini adalah segala pihak yang berkaitan dalam berjalannya suatu perusahaan. Contohnya: karyawan perusahaan, masyarakat, lingkungan, konsumen, pemerintah, dll.

1. Prinsip *Sustainability*

Prinsip *Sustainability* merupakan suatu prinsip pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang memperhatikan dan menjaga kemampuan sumber daya yang ada agar dapat tetap mengalami peningkatan yang berguna mbagi masyarakat. Dengan dijalankan Prinsip *Sustainability* ini, maka antara perusahaan dengan masyarakat harus saling mendukung dalam pelaksanaan prinsip ini. Prinsip *Sustainability* hanya akan dapat terwujud apabila adanya keterlibatan dari pihak masyarakat. Bagi perusahaan, dengan diterapkannya prinsip ini secara konsisten dan terus-menerus, maka diharapkan perusahaan tersebut akan mampu menciptakan eksistensi bisnis yang baik. Dan bagi masyarakat juga

2. Prinsip *Accountability*

Prinsip *Accountability* merupakan suatu bentuk pirinsip yang ditunjukkan oleh suatu individu atau perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya dalam mengelola sumber daya public secara fiskal, manajerial dan program kegiatan pemberian bantuan kemanusiaan. Hal ini ditujukan sebagai tanggapan terhadap kondisi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.

3. Prinsip *Transparency*

Prinsip *Transparency* merupakan suatu prinsip yang sangat penting dijalankan oleh suatu perusahaan, karena prinsip ini identik dengan informasi dan laporan mengenai keuangan yang wajib diberitahukan kepada seluruh pihak, baik itu *shareholder* maupun *stakeholder*. Suatu perusahaan yang membuat laporan kegiatan pelaksanaan suatu program dan mempertanggungjawabkannya kepada seluruh pihak yang terkait akan mendapatkan citra yang positif. Hal tersebut akan dapat meningkatkan reputasi yang baik bagi perusahaan yang menjalankan prinsip ini.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa unsur yang penting, yaitu :

1. CSR sebagai kewajiban

Dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimohonkan oleh Para Pengusaha, dinyatakan bahwa CSR yang ada di Indonesia bersifat *mandatory* (memaksa/sebagai suatu kewajiban). Meng pada mulanya CSR itu sendiri lahir di Negara Inggris dan Eropa. Di Negara tersebut, CSR dilahirkan sebgai suatu kegiatan yang bersifat *voluntary* (sukarela). Namun setelah diundangkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sifat sukarela dari CSR ditingkatkan menjadi bersifat *mandatory*. Pengaturan CSR yang dinyatakan sebagai suatu *mandatory* (kewajiban hukum) tentunya menjadikan CSR itu sendiri lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat *voluntary* (sukarela). Adapun peningkatan CSR yang bersifat *voluntary* menjadi *mandatory*, diharapkan mampu meningkatkan kontribusi dari suatu Perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Perusahaan tersebut.

2. Perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA)

Sumber daya alam yang dimaksud merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui (*renewable resources*) maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). Dalam UU PT, perseroan yang diwajibkan melakukan CSR terdiri dari:¹⁷

- a. Perseroan yang menjalani kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, yaitu perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam; maksudnya adalah perseroan yang benar-benar bergerak di bidang SDA.
- b. Perseroan yang menjalani kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam yaitu perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usaha berdampak pada fungsi kemampuan SDA.

3. CSR dianggarkan sebagai biaya

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimohonkan oleh Para Pengusaha, dinyatakan bahwa suatu Perusahaan harus dapat membedakan antara biaya pungutan pajak yang diberikan oleh suatu Perusahaan dengan biaya CSR yang sudah dianggarkan dan diperhitungkan dalam suatu Perusahaan. Biaya pungutan pajak digunakan untuk pembangunan secara nasional, sedangkan biaya CSR dipergunakan bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut dan juga sebagai alat untuk dapat memulihkan keadaan lingkungan dimana Perusahaan itu berada. CSR merupakan suatu kewajiban Perusahaan yang dimana biayanya sudah dianggarkan dan diperhitungkan pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang didasari oleh kemampuan Perusahaan tersebut. Dengan

demikian, tidak memungkinkan dalam suatu Perusahaan itu terjadi pungutan ganda.

4. CSR dilakukan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran

Pelaksanaan CSR yang diperhitungkan dan dianggarkan harus memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Hal ini semakin sulit karena tidak ada batasan mengenai kepatutan dan kewajaran tersebut. Klausul .kepatutan dan kewajaran. menurut rancangan peraturan pemerintah ini adalah sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko serta tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya. Tidak ada berapa persen .tarif. CSR dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Pelaksanaan CSR ini harus dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggung jawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Masyarakat dapat melakukan keberatan kepada perseroan jika perseroan tidak melaksanakan CSR sebagaimana mestinya. Keberatan ini disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Nantinya keberatan ini akan ditindak lanjuti oleh perusahaan.

5. Adanya sanksi

Konsekuensi dari kewajiban melaksanakan CSR menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi yang diberikan pun beraneka ragam dengan memperhatikan hukum positif yang sudah ada dan berkaitan dengan sumber daya alam seperti: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam artian bahwa pengaturan maupun sanksi yang akan diterapkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Sanksi yang diterapkan secara umum berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana.

¹⁷ Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

6. Pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP)

Maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (4) UUPT, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang mengatur mengenai tanggung jawab social dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan guna mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pelaksanaan CSR oleh suatu Perseroan dapat menjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan *stakeholder*-nya sehingga mampu menciptakan suasana iklim investasi yang kondusif, mampu menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan serasi dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif lainnya bagi kelangsungan bisnis Perseroan. Dengan terwujudnya hal ini, maka diharapkan ketertarikan dari para investor untuk berinvestasi di Perseroan yang melaksanakan CSR di Indonesia. Dengan penjelasan di atas, maka dapat dipastikan bahwa secara tidak langsung pelaksanaan CSR secara konsisten oleh perusahaan akan mampu menciptakan iklim investasi (penanaman modal) yang baik. Anggapan yang mengatakan bahwa CSR akan menghambat iklim investasi patut ditolak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diajukan simpulan sebagai berikut :

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perseroan Terbatas adalah suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh suatu Perseroan Terbatas. Hal ini didasari pada ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang telah diperintahkan sesuai bunyi pasal 74 ayat (4) UUPT. Adapun maksud dari pengaturan CSR di dalam PP tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat mengenai CSR dan memperkuat pengaturan CSR tersebut. Adapun tujuan dari pelaksanaan CSR ini adalah untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
2. Iklim investasi yang kondusif menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah apabila terwujud kepastian hukum dan kepastian berusaha, mudahnya diberikan perizinan bagi penanam modal, kondisi politik yang baik dalam suatu Negara, ekonomi yang tidak berbiaya tinggi sehingga menguntungkan bagi penanam modal. Hal ini dapat terwujud jika asas-asas yang terkandung dalam UUPM menjadi pedoman bagi terlaksananya suatu kegiatan investasi. Adapun asas-asas tersebut adalah asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas

kemandirian dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3. Pelaksanaan Prinsip *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dapat dilihat apabila perusahaan tersebut telah melakukan prinsip *responsibility, sustainability, accountability, transparency* dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ISO 26000. Pengaruh prinsip *Corporate Social Responsibility* terkait dengan Iklim Investasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah pelaksanaan CSR oleh suatu Perseroan dapat menjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan *stakeholder*-nya. CSR memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan suasana iklim investasi yang kondusif, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi dunia usaha, serta semakin kuatnya jaringan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dengan dunia usaha. Dengan terwujudnya hal ini, maka diharapkan ketertarikan dari para investor untuk berinvestasi di Perseroan yang melaksanakan CSR di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dapat lebih tegas lagi menerapkan sanksi-sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan CSR yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40/2007, supaya perusahaan nantinya lebih konsisten dalam melaksanakan kewajiban CSR dalam perusahaannya. Dapat dikatakan bahwa CSR masih belum terstruktur dengan baik, dengan adanya bermacam-macam konsep dan metode implementasi maupun standar pengukuran.
2. Pemerintah kiranya dapat membentuk suatu Badan Pengawas pada setiap daerah yang secara khusus mengawasi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh setiap Perusahaan. Sehingga Badan Pengawas itu dapat menyatakan dengan tegas jika ada Perusahaan yang ternyata tidak melaksanakan CSR.
3. Pengusaha sebaiknya menjalankan program-program pengembangan masyarakat seperti bentuk penerapan CSR dengan adanya kerja sama kepada pihak pemerintah untuk melakukan penerapan CSR.
4. Pengusaha harusnya membentuk departemen khusus tersendiri yang bertugas menjalankan CSR sehingga upaya ini dapat dilakukan dengan fokus dan terarah dan bantuan yang diberikan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat disekitar perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Bank Dunia, *Laporan Pembangunan Dunia; Iklim Investasi yang Lebih Baik Bagi Setiap Orang*. Jakarta : Salemba Empat, 2005.
- McCoubrey, Hilaire dan Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, London : Blackstone Press Limited, 1996.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Bandung : Nuansa Aulia, 2010.
- Sidabalok, Janus,. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.

Untung, Budi. *Hukum Investasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

WEBSITE

Departemen Hukum & HAM, 2010, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal", Available from:<http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/jurnal-legislasi>.

Elkington, John. January 2000, *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Journal of Business Ethics, Volume 23, Number 2, available from:<http://www.springerlink.com/business-and-economics>.

Nasution, Bismar. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial", <http://bismar.wordpress.com/>, (diakses tanggal 30 November 2012).

Soenarto, Sastro. Koordinator *Indonesian Investment Watch* (Indvest). <http://www.indvest.watch.com./indonesia.htm>, (diakses tanggal 26 Desember 2012).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

